



B U L E T I N S W A R A A *Pelatihan*

BPSDM

PROV. PAPUA BARAT



LIPUTAN UTAMA

IDENTITAS LEMBAGA



Profil BPSDM PAPUA BARAT

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat didirikan pada tahun 2008 di Manokwari adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Papua Barat dibidang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur telah berkembang dari organisasi pendidikan dan pelatihan yang besar. Pada tahun 2008, Badan Pelatihan Provinsi Papua Barat mengalami perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 10 Tahun 2008.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat memiliki kampus utama di Manokwari. Semenjak berdirinya sampai dengan sekarang lebih dari 312 alumni dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat telah berpartisipasi mengikuti Pelatihan aparatur.

LIPUTAN UTAMA

VISI DAN MISI BPSDM



VISI BPSDM

PAPUA BARAT

BuMenjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) DalamMewujudkan
Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasidan
Integritas Yang Tinggi.

KEBIJAKAN UMUM

BPSDM

Seluruh Jajaran Badan Pelatihan Provinsi Papua Barat
bertekad secara konsistendan berkelanjutan mewujudkan
SDM Aparaturyang berkualitas melalui penyelenggaraan
Pelatihan yang profesional dan berbasis kompetensi.

SWARA PELATIHAN

BPSDM PAPUA BARAT



DIKLAT REVOLUSIMENTAL

Revolusi mental sesungguhnya adalah ikhtiar untuk mencapai tujuan utama pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Revolusi mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif dari warga negaranya. Revolusi mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan.

SWARA PELATIHAN

BPSDM PROVINSI PAPUA BARAT



DIKLAT REVOLUSI MENTAL;

KEBIJAKAN PELATIHAN REVOLUSI MENTAL

peran dari revolusi mental dalam membangun budaya kerja institusi adalah mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja (orientasi outcome). Dalam hal ini Diperlukan sosok aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kaidah, nilai dan norma dalam rangka terciptanya etika kerja yang penuh tanggung jawab, sebagai suatu budaya kerja aparatur.

SWARA PELATIHAN

BPSDM PROVINSI PAPUA BARAT



DIKLAT TELAHAAN STAF

KEBIJAKAN PELATIHAN REVOLUSI MENTAL

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010, didefinisikan bahwa telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.